PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jl.Mastrip no.7 Nganjuk Kode Pos 64419
Telp./Fax(0358)330055e-mail: dinas.prkpp@nganjukkab. go.id

Nganjuk, 24 Juni 2024

Kepada :
Yth. Inspektorat Daerah
Kabupaten Nganjuk

Di
NGANJUK

SURAT PENGANTAR

Nomor : 600/ 1151 /411.315/2024

No.	Jenis surat yang di kirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk	1 (satu) Bendel	Dikirim dengan hormat untuk memenuhi surat Bupati Nganjuk No X.700/73/411.200/2024,Tanggal 10 Juni 2024 Hal Surat penegasan Masalah Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN NGANJUK

AGUS FRIHANNEDY,SPd. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640901 198703 1 013

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jl. Mastrip No. 7 Nganjuk Kode Pos 64419
Telepon/Fax (0358) 330055 Email : prkppnganjuk@gmail.com

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023 DINAS PERUAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN NGANJUK

I. PENDAHULUAN

A. Umum/Latar Belakang

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 bertujuan untuk mengetahui sejauhmana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, serta mendorong setiap Instansi Pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini bertujuan untuk menyampaikan informasi bahwa Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 telah ditindaklanjuti.

II. URAIAN HASIL EVALUASI

A. KONDISI.

1). Perencanaan kinerja

Perencanaan Kinerja mencakup Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Rencana Strategis (Renstra), DPA, Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan, Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Indikator Kinerja Individu (IKI), Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai dan Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut :

a. Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia;
b. Dokumen Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya memenuhi standar yang baik;

c. Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

Catatan yang perlu mendapatkan perhatian :

Pada Dokumen Rencana Aksi, Program/kegiatan/sub kegiatan belum menunjukan dukungan terhadap masing-masing kinerja sasaran.

2). Pengukuran Kinerja.

Pengukuran Kinerja mencakup keberadaan pedoman teknis dan mekanisme pengukuran kinerja mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja hingga pemanfaatannya.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja diperoleh gambaraan sebagai berikut :

a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan;
b. Pengukuran Kinerja tekah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan;
c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, serta penyesuaian strategi dalam kinerja yang efektif dan efisien.

Catatan yang perlu mendapatkan perhatian :

a. Pengukuran terhadap target kinerja pada rencana aksi belum dilaksanakan, yang ada adalah dokumen formulir evaluasi hasil RKPD dan laporan monitoring evaluasi rencana aksi, namun demikiian target kinerja tidak sesuai dengan rencana aksi.
b. Laporaan evaluasi kinerja internal setiap tribulan selain menyajikan capaian kinerja juga realisasi anggaran.

3). Pelaporan Kinerja.

Pelaporan kinerja mencakup pemenuhan pelaporan kinerja, penyampaian, publikasi, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaporan kinerja diperoleeh gambaran sebagai beriut :

a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja, yaitu LKjIP
b. Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya memenuhi Standar yang menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, namun telah menyajikan informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya.

c. Pelaporan Kinerja beelum sepenuhnya memberikan dampak dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam pencapaian kinerja berikutnya .

Catatan yang perlu mendapat perhatian :

a. Laporan Kinerja relativ telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, namun masih terdapat catatan atas capaian kinerja yang diinformasikan dalam LKjIP belum relevan, untuk capaian indicator sasaran persentase pengurangan luasan kawasan kumuh disajikan berdasarkan capaian komulatif sehingga berilai diatas 100% dari target 58,5% sedangkan capaian Tahun 2023 seharusnya tidak bernilai diatas 100% dari target 58,5%.
b. Laporan Kinerja belum menyajikan upaya perbaikan kinerja yang relevan dengan permasalahan kinerja, berdasarkan laporaan evaluasi renja setiap tribulan terkait rekomendasi belum sesuai dengan analisa capaian kinerjaa yang dievaluasi.
c. Informasi dalam LKjIP 2023 belum dimanfaatkan secara optimal dalam penyesuaian perencanaan kinerja periode selanjutnya (2024)

4). Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitass Kinerja Internal mencakup keberadaan pedoman teknis evaluasi, kualitas evaluasi, pemenuhan tindak lanjut hasil evaluasi internal dan pemanfaatan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut :

a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan;
b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai.
c. Implementassi SAKIP belum meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum optimal sehinggaa belum dapat memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.

II. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan/direkomendasikan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk memperbaiki ddimasa yang akan datang, yaitu :

1). Perencanaan Kinerja

Reencana aksi yang disusun seharusnya merinci langkah langkah konkret/tindakan nyata yang akan diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk memperkuat efektivitas rencana aksi yang akan meningkatkan koherensi dan

keselarasan dalam implementasi disarankan untuk meninjau setiap program, kegiatan dan sub kegiatan mendukung setiap indikator kinerja sasaran karena rencana aksi digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya kegiatan.

2). Pengukuran Kinerja

a. Melaksanakan pengukuran rencana aksi secara sistematis dan terarah melalui evaluasi berkala terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana aksi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pengukuran rencana aksi untuk mendorong keterlibatan aktif dalam pencapaian tujuan.

b. Laporan evaluasi kinerja internal setiap tribulan supaya dioptimalkan dalam penyajian capaian kinerja dan capaian anggaran untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efesiensi.

3). Pelaporan Kinerja

a. Disarankan untuk melakukan peninjauan ulang terhadap data dan proses pengukuran, pelaporan serta evaluasi lebih lanjut terhadap indikator yang digunakan guna memastikan ukuran informasi yang disajikan.

b. Rekomendasi yang disajikan pada LkjIP/laporan kinerja interim disesuaikan dengan analisa capaian kinerja yang telah dievaluasi supaya relevan dengan permasalahan kinerja yaitu langkah langkah perbaikan harus didasarkan pada kendala/hambatan yang diperolah dari evaluasi kinerja, seehingga dapat memberikan upaya / strategi yang tepat dan efektif untuk meningkatkan kinerja.

c. Rekomendasi perbaikan kinerja pada LkjIP Tahun 2023 ssupaya dibuat pedoman untuk sstrategi perbaikan kinerja pada periode Renja Tahun 2024.

III. TINDAK LANJUT.

1). Perencanaan Kinerja

Rencana aksi akan disusun lebih rinci lagi yang memuat langkah langkah konkret/tindakan nyata yang akan diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2). Pengukuran Kinerja

a. Rencana aksi akan diukur secara sistematis dan terarah melalui evaluasi berkala terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong keterlibatan aktif dalam pencapaian tujuan.

b. Laporan evaluasi kinerja internal setiap tribulan akan dioptimalkan dalam penyajian capaian kinerja dan capaian anggaran untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efesiensi.

3). Pelaporan Kinerja

a. Akan dilakukan peninjauan ulang terhadap data dan proses pengukuran, pelaporan serta evaluasi lebih lanjut terhadap indikator yang digunakan guna memastikan ukuran informasi yang disajikan.

b. Rekomendasi yang disajikan pada LkjIP/laporan kinerja interim akan disesuaikan dengan analisa capaian kinerja yang telah dievaluasi supaya relevan dengan permasalahan kinerja yaitu langkah langkah perbaikan harus didasarkan pada kendala/hambatan yang diperolah dari evaluasi kinerja, seehingga dapat memberikan upaya / strategi yang tepat dan efektif untuk meningkatkan kinerja.

c. Rekomendasi perbaikan kinerja pada LkjIP Tahun 2023 akan dibuat pedoman untuk sstrategi perbaikan kinerja pada periode Renja Tahun 2024

IV. PENUTUP

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya, dan semua masukan serta rekomendasi akan kami jadikan bahan untuk peningkatan nilai Akuntabilitass Kinerja Instansi Pemerintah di tahun tahun yang akan datang.

Nganjuk, 19 Juni 2024
Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Nganjuk

AGUS FRIHANNEDY,S.Pd.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640901 198703 1 013

Paraf Hierarkis

No.	Pejabat	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Dinas / Badan		19/6-24
2.	Kasubbag		19/6-24